

PENDIDIKAN DAN PENANAMAN BUDI PEKERTI

Nur Latifah

STID Mustafa Ibrahim Kediri Lombok Barat

Email: Nurlatifaho6@yahoo.com

Abstrak

Orientasi pendidikan nasional yang cenderung melupakan pengembangan dimensi nilai dan moral telah merugikan peserta didik secara individual maupun kolektif. Tendensi yang muncul adalah, peserta didik akan mengetahui banyak tentang sesuatu, namun ia menjadi kurang memiliki sistem nilai, sikap, minat maupun apresiasi secara positif terhadap apa yang diketahui. Anak akan mengalami perkembangan intelektual tidak seimbang dengan kematangan kepribadian sehingga melahirkan sosok spesialis yang kurang peduli dengan lingkungan sekitar (*split personality*) dan rentan mengalami distorsi nilai.

Kata kunci: *Pendidikan nasional, budi pekerti.*

A. PENDAHULUAN

Dalam hidup dan kehidupan manusia, nilai-nilai moral merupakan sarana pengatur dari kehidupan bersama yang sangat menentukan. Pentingnya nilai-nilai moral menjadi lebih penting lagi bila dikaitkan dengan globalisasi yang membawa berbagai persoalan sosial yang melahirkan mutlikrisis.

Di Indonesia, setidaknya ada tiga gejala sosial yang dapat dikatakan merupakan indikasi bahwa bangsa kita masih mengedepankan krisis moral. Tiga gejala sosial tersebut, yaitu: *pertama*, masih merajalelanya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dari tingkat hulu sampai hilir birokrasi pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat; *kedua*, lemahnya rasa tanggung jawab sosial para pemimpin bangsa serta pejabat public umumnya; *ketiga*, kurangnya rasa kemanusiaan cukup banyak warga masyarakat kita (Dewey, 1950: 106).

Searah dengan hal di atas, dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan pendidikan budi pekerti pada lembaga pendidikan formal khususnya. Tuntutan tersebut muncul dilatarbelakngi oleh

setidak dua kondisi, yaitu, *pertama*, Indonesia saat ini sepertinya telah kehilangan krisis karakter yang telah dibangun berabad-abad. Keramahan, tenggang raa, kesopanan, rendah hati, suka menolong, solidaritas sosial, dan sebagainya yang merupakan jati diri bangsa seolah-olah hilang begitu saja.

Keadaan ini telah mengubah kesadaran bersama terhadap perlunya memperkuat kembali dimensi moralitas bangsa kita. *Kedua*, kondisi lingkungan sosial kita belakangan ini diwarai oleh maraknya tindakan barbarisme, vandalisme baik fisik maupun non-fisik, semakin tumbuh suburnya perilaku korupsi, nepotisme, kolusi baru, hilangnya keteladanan pemimpin, sering terjadinya pembenaran politik dalam berbagai permasalahan yang jauh dari kebenaran universal, larutnya semangat berkorban bagi bangsa.

Dapat dikatakan, krisis moral menimpa bangsa semakin menjadi-jadi, ditandai dengan maraknya tindakan asusila, kekerasan, pembunuhan, perjudian, pornografi, meningkatnya kasus, kenakalan remaja, jumlah pecandu narkoba dan minuman-minuman keras serta menjalarnya penyakit sosial lain yang semakin kronis.

Terjadinya krisis moral seperti sekarang ini sebagian bersumber dari kesalahan lembaga pendidikan yang dianggap belum optimal dalam membentuk kepribadian peserta didik. Lembaga pendidikan dinilai menerapkan paradigma partialistik karena memberikan porsi sangat besar untuk transmisi pengetahuan, namun melupakan pengembangan sikap, nilai dan perilaku dalam pembelajarannya, dimensi sikap juga tidak menjadi komponen penting dari proses evaluasi pendidikan. Hal demikian terjadi karena model penilaian yang berlaku untuk beberapa mata pelajaran yang berkaitan dengan pendidikan nilai selama ini hanya mengukur kemampuan kognitif peserta didik.

B. PENDIDIKAN BUDI PEKERTI

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1991: 150), kata budi pekerti mempunyai pengertian antara lain: akal, tabiat watak, akhlak, perbuatan baik, daya upaya, dan ikhtiar. Menurut draft kurikulum berbasis kompetensi (2001), budi pekerti berisi nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut kebaikan dan keburukannya melalui norma agama, norma hukum, tata karma dan sopan santun.

Ki Hajar Dewantara, menegaskan bahwa budi pekerti dapat diartikan antara lain: 1) budi adalah akal batin manusia untuk menimbang baik dan buruk, benar salah, luhur hina, halus kasar, dan sebagainya, 2) budi pekerti merupakan aktualisasi hasil pertimbangan budi tadi dalam perbuatan manusia, baik perbuatan

yang tampak maupun tidak tampak, 3) watak merupakan bagian integral dari kepribadian manusia, dan kepribadian itu secara baik secara individual maupun masyarakat merupakan kehadiran seseorang atau bangsa itu, 4) budi pekerti manusia akhirnya merupakan realisasi dan sekaligus menunjukkan jati diri manusia itu sendiri (Ki Fudyartanta, 2010: 282)

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat didefinisikan bahwa budi pekerti adalah perbuatan yang mempergunakan pertimbangan akal baik buruk. Dengan kata lain budi pekerti adalah tingkah laku nyata yang berdasarkan pertimbangan batin manusia dan teruju pada suatu maksud.

Pendidikan budi pekerti disebut juga pendidikan moral, pendidikan karakter, pendidikan akhlak merupakan pendidikan nilai-nilai luhur yang berakar dari agama, adat istiadat dan budaya bangsa, dalam mengembangkan kepribadian peserta didik supaya menjadi manusia yang baik.

Menurut Jarolimek (1990: 53) pendidikan budi pekerti adalah program pengajaran di sekolah yang bertujuan mengembangkan watak atau tabiat siswa dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam kehidupannya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan kerja sama yang menekankan ranah efektif (perasaan dan sikap) tanpa meninggalkan ranah kognitif dan ranah skill/psikomotorik (keterampilan).

Dalam pendidikan budi pekerti nilai-nilai yang perlu ditanamkan adalah penanaman dan pengembangan nilai, sikap dan perilaku peserta didik sesuai dengan nilai-nilai budi pekerti luhur. Diantara nilai-nilai yang perlu ditanamkan adalah nilai kesopanan, berdisiplin, berhati lapang, berhati lembut, beriman dan bertaqwa, berkemauan keras, bertanggung jawab, mawas diri, mencintai ilmu, bertenggang rasa, jujur, rasa persaudaraan, sabar, kebersamaan, keterbukaan dan lain sebagainya.

Jika dicermati sebenarnya ada dua aspek yang menjadi orientasi pendidikan budi pekerti. *Pertama*, membimbing hati nurani peserta didik agar berkembang lebih positif secara bertahap dan berkesinambungan. *Kedua*, memupuk, mengembangkan, menanamkan nilai-nilai dan sifat-sifat positif ke dalam pribadi peserta didik.

Pendidikan budi pekerti memiliki kesamaan dengan orientasi pendidikan moral. Pendidikan moral adalah pekerjaan membimbing generasi muda untuk secara sukarela pengikatkan diri pada norma-norma atau nilai-nilai. (Buchori, 2002). Dengan demikian jelas, bahwa pendidikan moral memiliki komitmen terhadap langkah-langkah apa yang seharusnya dilakukan seorang pendidik

untuk mengarahkan generasi muda pada nilai-nilai dan kebajikan yang akan membentuknya menjadi manusia yang baik.

C. PENDIDIKAN SEBAGAI WAHANA PENANAMAN BUDI PEKERTI.

Secara operasional pendidikan budi pekerti merupakan upaya untuk membekali peserta didik melalui bimbingan, pengajaran dan latihan selama pertumbuhan dan perkembangan diri sebagai bekal masa depannya agar memiliki hati nurani yang bersih, berperagai baik, serta menjaga kesucian dalam melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan dan sesama makhluk (Zuriah, 2007: 20).

Pendidikan budi pekerti merupakan upaya untuk membantu subyek didik mengenal, menyadari pentingnya, dan menghayati nilai-nilai moral yang seharusnya dijadikan panduan bagi sikap dan perilakunya sebagai manusia, baik secara perorangan maupun bersama-sama dalam suatu masyarakat. Nilai moral mendasari prinsip dan norma hidup baik yang memandu sikap dan perilaku manusia sebagai manusia dalam hidupnya. Kualitas hidup seseorang sangat ditentukan oleh nilai-nilai, termasuk didalamnya nilai moral yang senyatanya dihayati sebagai pemandu serta penentu sikap dan perilakunya, baik dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, alam sekitar maupun dalam hubungannya dengan Tuhan. Watak dan kepribadian seseorang dibentuk oleh nilai-nilai yang senyatanya dipilih, diusahakan, dan secara konsisten dihayati dalam tindakan (Sudarminta, 2004: 109).

Dalam Sistem pendidikan nasional di Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan tegas merumuskan tujuang pendidikan, yaitu: mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Maksud manusia seutuhnya adalah manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur. Disamping itu juga memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sebenarnya tujuan yang terdapat dalam sistem pendidikan nasional kita sudah sangat lengkap untuk membentuk anak didik menjadi pribadi utuh yang dilandasi akhlak dan budi pekerti luhur. Pendidikan memiliki peran penting dan strategis dalam menanamkan nilai-nilai budi pekerti dan moral dalam hidup kehidupan manusia dalam suatu masyarakat. Melalui pendidikanlah penanaman nilai-nilai budi pekerti dapat di transformasikan karena bagaimanapun pendidikan merupakan wahana transformasi nilai (*transformation of value*).

Menurut Imam Ghazali pendidikan budi pekerti harus sejalan dengan tujuan pendidikan itu sendiri yaitu realisasi tujuan keagamaan dan akhlak, dengan titik penekanannya pada perolehan keutamaan dan *taqarrub* kepada Allah, dan bukan untuk mencari kedudukan yang tinggi atau mendapatkan kemegahan dunia (Ramayulis dan Nizar, 2009:271). Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, seorang pemikir Islam terkemuka menyatakan bahwa pendidikan bertujuan selain untuk terbentuknya pribadi Muslim yang baik, yaitu seseorang yang berpikir, merasa dan bekerja pada berbagai lapangan kehidupan pada setiap waktu, juga untuk terciptanya masyarakat yang baik yang sejalan dengan ketentuan sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh al-Qur'an dan sunnah (Nata, 2003: 142).

Berkaitan dengan pendidikan budi pekerti, Ibn Miskawaih menyatakan bahwa konsep pendidikan harus bertumpu kepada pendidikan akhlak. Lebih jauh Ibn Miskawaih mengungkapkan bahwa pendidikan akhlak dimaksudkan untuk terwujudnya sikap batin yang mampu mendorong secara spontan untuk melahirkan semua perbuatan yang bernilai baik, sehingga mencapai kesempurnaan dan memperoleh kebahagiaan sejati dan sempurna (Nata, 2003: 11).

D. PENDEKATAN DAN STRATEGI PENDIDIKAN BUDI PEKERTI.

1. Pendekatan Pendidikan Budi Pekerti

Pendidikan budi pekerti di era globalisasi saat ini dipandang sudah tidak memadai lagi, jika hanya diajarkan dengan metode pembelajaran tradisional yang cenderung didasarkan asumsi bahwa bahwa peserta didik memiliki kebutuhan yang sama, belajar dengan cara yang sama dan pada waktu sama, dalam ruang kelas yang tenang, dengan kegiatan materi pelajaran yang terstruktur secara kata dan didominasi oleh guru. Keberhasilan pendidikan budi pekerti sangat ditentukan oleh metode belajar. Ketepatan guru dalam memilih dan mengaplikasikan metode penanaman nilai budi pekerti.

Proses penanaman nilai budi pekerti yang dianggap cocok untuk anak-anak adalah model pembelajaran yang didasarkan pada interaksi sosial dan transaksi. Model pembelajaran yang bersifat interaksi sosial ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip, yaitu: a) pelibatan peserta didik secara aktif dalam belajar, b) berdasarakan pada perbedaan individu, c) mengaitkan teori dengan praktik, d) mengembangkan komunikasi dan kerja sama dalam belajar, e) meningkatkan keberanian peserta didik dalam mengambil resiko dan belajar dari kesalahan, f) meningkatkan pembelajaran sambil sambil berbuat sambil bermain, g) menyesuaikan pelajaran dengan taraf perkembangan kognitif yang masih taraf operasi konkret.

Efektivitas proses pembelajaran nilai budi pekerti agaknya sangat dipengaruhi oleh ketepatan pendekatan yang dipilih guru dalam mengajarkan materi tersebut. Menurut penulis ada beberapa pendekatan yang dapat dipergunakan dalam pendidikan budi pekerti, yaitu:

Pertama, pendekatan *avocation* adalah pendekatan yang memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada peserta didik untuk secara bebas mengekspresikan respon efektifnya terhadap stimulus yang diterimanya.

Kedua, pendekatan *inculcation* adalah suatu pendekatan yang memberikan penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri peserta didik. Nilai-nilai sosial perlu ditanamkan kepada peserta didik karena nilai-nilai sosial berfungsi sebagai acuan bertingkah laku dalam interaksi sosial dengan sesama sehingga keberadaannya dapat diterima di masyarakat. Berkaitan dengan nilai-nilai sosial, Raven menyatakan bahwa nilai-nilai sosial merupakan seperangkat sikap individu yang dihargai sebagai suatu kebenaran dan dijadikan standar bertingkah laku memperoleh kehidupan masyarakat yang demokratis dan harmonis.

Ketiga, pendekatan *moral reasoning* adalah pendekatan agar terjadi transaksi intelektual taksonomi tinggi dalam mencari pemecahan suatu masalah. *Keempat*, pendekatan *value clarification* adalah pendekatan melalui stimulus terarah agar peserta didik diajak mencari kejelasan isi pesan keharusan nilai moral. *Kelima*, pendekatan *value analysis* adalah pendekatan bagi peserta didik dirangsang untuk melakukan analisis nilai moral. *Keenam*, pendekatan *value awareness*, adalah pendekatan agar peserta didik menerima stimulus dan dibangkitkan kesadarannya akan nilai tertentu. *Ketujuh*, pendekatan *commitment approach* adalah pendekatan agar peserta didik sejak awal diajak menyepakati adanya suatu pola pikir dalam proses pendidikan nilai. *Kedelapan*, pendekatan *union approach* adalah pendekatan agar peserta didik diarahkan untuk melaksanakan secara riil nilai-nilai budi pekerti dalam suatu kehidupan.

Selain itu, pendekatan pendidikan budi pekerti dapat diajukan tiga macam orientasi pendekatan, yaitu: 1) pendekatan humanis- holistik (kepribadian integrasi), yaitu mewawas bahwa pendidikan budi pekerti harus dapat membantu pembangunan kepribadian peserta didik seutuhnya, dalam arti bahwa semua potensi dan kemampuan peserta didik dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Pertumbuhan jasmaniah dan perkembangan kejiwaan diupayakan selaras dan harmonis agar dapat mewujudkan perilaku baik nyata, sehingga tercapailah kebahagiaan dan keselamatan hidup peserta didik dalam masyarakat. 2). Pendekatan kurikulum integratif, artinya bahwa pada prinsipnya kurikulum pendidikan secara implicit telah bermuatan pendidikan budi pekerti. Secara

pragmatis dapat dikatakan, bahwa pengetahuan harus dijadikan landasan agar manusia dapat berbuat secara benar dan baik. Memang dalam memasukkan isi atau misi pendidikan budi pekerti dari setiap mata pelajaran memerlukan guru yang lihai, yang cakap dan mempunyai kiat atau seni mendidik anak-anak. Secara khusus, perlu meningkatkan pendidikan agama dan pendidikan Pancasila dapat membawakan misinya sebagai sarana untuk mendidik moral anak-anak, 3) pendekatan metodologis okasional, arti para guru pada waktu mengajar suatu mata pelajaran agar pandai-pandai memasukkan pendidikan watak secara okasional atau spontan dengan memasukkan kesadaran moral dan contoh-contoh aplikatif pada perilaku baik, terutama yang dapat dilakukan oleh anak-anak sendiri (Ki Fudyartanta, 2010: 285).

Kunci dari ketiga pendekatan budi pekerti yang diajukan di atas adalah penanaman rasa dan rasio ketauhidan manusia kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab dengan keimanan dan ketaqwaan terhadap-Nya serta melaksanakan perintahnya sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing, maka dapat diupayakan keselarasan dan keharmonisan antara pengetahuan rasio (kecerdasan) dengan pengetahuan dan rasa ketauhidan-kekaidahannya untuk menanggulangi berbagai macam dekadensi moral.

2. Strategi Pendidikan Budi Pekerti.

Sesuai dengan visi pendidikan budi pekerti, pelaksanaan pendidikan budi pekerti yang selama ini banyak dimaknai secara tradisional dan lokal telah direkonseptualisasi dan direposisi menjadi “pendidikan budi pekerti” diyakini akan memberikan kontribusi yang bermakna dalam upaya pembentukan “manusia Indonesia seutuhnya”. Dengan demikian, kesimpangsiuran pendapat tentang status dan peran pendidikan budi pekerti dalam instrumentasi dan praksis pendidikan nasional Indonesia sudah diluruskan, yakni bahwa:

- a. Pendidikan budi pekerti menjadi bagian integral dari mata pelajaran yang berdiri sendiri,
- b. Pendidikan budi pekerti menjadi bagian integral dari mata pelajaran yang relevan, khususnya mata pelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, serta mata pelajaran lainnya

Pola pikir akademis dan paedagogis tersebut, diyakini sangatlah tepat karena memang secara substantif dan praksis budi pekerti tidak bisa dilepaskan dari tujuan, instrument, dan praksis kurikuler dan paedagogis mata pelajaran keagamaan, sosial, dan humaniora. Semua mata pelajaran tersebut secara esensial mengandung pengembangan kognitif, afeksi, dan keterampilan sosial yang

diyakini sangat potensial dalam mengembangkan individu “orang Indonesia” menjadi warga masyarakat yang baik sekaligus menjadi bagian masyarakat global yang mampu hidup harmonis di tengah-tengah kehidupan bersama, tanpa kehilangan jati dirinya.

Atas dasar pertimbangan hal-hal di atas, maka dalam penyelenggaraan pendidikan budi pekerti ditetapkan strategi dasar sebagai berikut:

- a. Pendidikan budi pekerti sebagai substansi dan praksis pendidikan di lingkungan persekolahan, terintegrasi dalam sejumlah mata pelajaran yang relevan dan iklim sosial budaya sekolah.
- b. Pengelolaan pendidikan budi pekerti dalam kurikulum dunia persekolahan dapat dilakukan melalui beberapa alternatif, antara lain:
 - 1) Mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah dan pendidikan atas, pendidikan budi pekerti diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang relevan, atau
 - 2) Pada pendidikan sekolah dasar diintegrasikan ke dalam bidang yang relevan, di sekolah dasar diintegrasikan ke dalam pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan, serta pendidikan bahasa Indonesia/ daerah,
 - 3) Pada pendidikan menengah, diintegrasikan ke dalam mata pelajaran pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan IPS, pendidikan Bahasa Indonesia/daerah, dan mata pelajaran lainnya yang relevan.

Secara kurikuler dan paedagogis nilai-nilai esensial dan operasional budi pekerti yang menjadi isi pendidikan budi pekerti, elanjutnya dikembangkan dan ditetapkan secara adaptif dalam pengembangan perangkat pembelajaran dan perwujudan praksis pendidikan budi pekerti. Yang dimaksud dengan penerapan yang adaptif adalah bahwa setiap mata pelajaran yang akan menjadi wahana dari pendidikan budi pekerti perlu:

- a. Menyeleksi dan mengorganisasikan butir-butir mana yang secara koheren dapat diintegrasikan ke dalam instrumentasi dan praksis mata pelajaran itu.
- b. Menyeleksi dan mengorganisasikan pengalaman belajar yang secara koheren layak dan bermakna dalam praksis mata pelajaran itu (Zuhriah, 2007:74-7).

Wahana dalam konteks ini dimaknai sebagai isi dan proses mata pelajaran yang relevan, yang dirancang untuk mengintegrasikan pendidikan budi pekerti. Sebagai contoh antara lain akhlak dalam pendidikan agama, demokrasi dan

HAM dalam PPKn. Pemilihan mata pelajaran pendidikan agama dan PPKn sebagai wahana untuk pendidikan budi pekerti, dinilai sangat tepat, karena secara konstitusional negara Republic Indonesia menempatkan sila-sila Pancasila sebagai fondasi dan sekaligus muara dari keseluruhan upaya pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, secara utuh perilaku warga negara tidak bisa lepas dari keimanan dan ketakwaannya sesuai dengan agama yang dianut serta akhlak dan budaya kewarganegaraannya dalam konteks masyarakat Indonesia.

E. MENAKAR KEBERHASILAN PENDIDIKAN BUDI PEKERTI

Tujuan utama pendidikan budi pekerti adalah untuk melakukan transmisi sistem nilai yang memungkinkan peserta didik mengalami perubahan sikap, sifat dan perilaku secara lebih positif. Tentunya dengan ukuran minimal untuk menilai seorang peserta didik telah mengalami perkembangan kualitas karakter atau moral. Seorang anak didik akan dinilai telah memiliki karakter jika ia mampu mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku sehari-hari. Jika berperilaku jujur, suka menolong, bekerja keras, ada rasa kebersamaan. Ia dapat dikatakan sebagai orang yang berkarakter mulia.

Berpijak pada prinsip-prinsip di atas, seorang peserta didik dianggap telah mengalami perkembangan moralitas positif jika ia telah memiliki kesadaran moral, sehingga dapat menilai dan membedakan hal-hal yang baik dan buruk, hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, serta hal-hal yang etis dan tidak etis. Peserta didik yang bermoral dengan sendirinya akan tampak dalam penilaian dan penanaman moralnya serta pada perilakunya baik baik, jujur, benar dan sesuai dengan etis. Ini berarti bahwa ada kesatuan antara penalaran moral dengan perilaku moralnya. Atas dasar ini maka betapapun bermanfaatnya suatu moral terhadap nilai kemanusiaan, namun jika perilaku tersebut tidak disertai dan didasarkan pada penalaran moral, maka perilaku tersebut belum dapat dikatakan sebagai perilaku moral yang mengandung nilai moral. Suatu perilaku moral dianggap jika perilaku tersebut dilakukan secara sadar atas kemauan sendiri dan bersumber dari pemikiran atau penalaran moral yang bersifat otonom.

DAFTAR PUSTAKA

- Buchori, Muchtar, *Pendidikan Antisipatoris*, (yogyakarta: Kanisius, 2001)
- Dewey, John, *Democracy and Education, An introduction to the Philosophy of Education*, The macmillan Company, New York, 1950
- Fudyartanta, *Membangun Kepribadian Watak Bangsa Indonesia yang Harmonis dan integral: Pengantar ke Wawasan Pendidikan Nasional Indonesia yang Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Nata, Abuddin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Jakarta: Grasindo, 2001
- Nizar, Syamsul dan Syaifudin, Muhamad, *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, Penerbit: Kalam Mulia, 2010
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 1991: 150),